

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era yang sekarang ini, sektor bisnis di Indonesia mulai berkembang. Tentu saja kebanyakan dari mereka masih memfokuskan tujuan utamanya pada pencarian keuntungan semata. Perusahaan atau organisasi lainnya menganggap bahwa sumbangsih kepada masyarakat cukup diberikan melalui nilai dalam penyediaan lapangan pekerjaan, pemenuhan kebutuhan dengan produknya dan pembayaran pajak kepada negara. Ketiga hal tersebut tidaklah cukup apabila perusahaan ingin bertahan sampai lima tahun ke depan karena masyarakat tidak hanya menuntut perusahaan menyediakan barang dan jasa saja tetapi juga pertanggungjawaban secara sosial terhadap kehidupannya. Hal inilah yang mendorong perubahan paradigma para pemegang saham dan pengguna laporan keuangan dimana fokusnya tidak hanya pada perolehan laba perusahaan tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar perusahaan (Cahyandito, 2011).

Menurut Ahmad Daniri (2008), Sesungguhnya substansi keberadaan *Corporate Social Responsibility* adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar *stakeholder* yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Atau dalam pengertian kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya,

komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya, baik lokal, nasional, maupun global. Karenanya pengembangan *Corporate Social Responsibility* kedepan seharusnya mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini terjadi perkembangan dalam penyusunan tersebut, dari *Corporate Social Responsibility* menjadi *Sustainability Reporting* atau *Social Responsibility* saja. Perubahan ini, disebabkan karena pedoman ISO 26000 diperuntukan bukan hanya bagi korporasi tetapi bagi semua bentuk organisasi, baik swasta maupun publik.

Pemerintah Indonesia telah mengatur pedoman pelaksanaan *Sustainability Reporting* dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Pasal 74 dan UU Penanaman Modal (UU PM, UU Nomor 25/2007). Lahirnya dua regulasi pemerintah tersebut banyak mendapat pertentangan dari berbagai pihak dalam dunia bisnis yang menyatakan bahwa peraturan tersebut seharusnya bersifat sukarela dan bukan bersifat wajib sehingga menimbulkan banyak penolakan terhadap regulasi pemerintah tersebut. Sejumlah penelitian tentang manfaat pengungkapan kegiatan sosial, seperti *sustainability reporting* telah banyak dilakukan. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa hal itu berdampak positif terhadap profitabilitas perusahaan maupun imbal hasil saham. Informasi kegiatan *sustainability reporting* itu akan membentuk kepercayaan baru yang dapat mendorong atau malah mengubah ekspektasi para investor terhadap keputusan untuk menahan, menjual, atau membeli lagi saham perusahaan. (Rokhim dan Widodo, 2007).

Dalam praktiknya, seperti yang kita telah ketahui CSR belum mempunyai dasar pemikiran dan aturan yang cukup jelas dan kuat. Hal ini dapat dilihat dari, pengimplementasian CSR itu sendiri masih bersifat sukarela (*voluntary*). Tim *International Organization for Standardization* (ISO) pada bulan September 2004 sebagai induk dari organisasi standar internasional mengundang berbagai pihak untuk melahirkan panduan (*guidelines*) dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama **ISO 26000** : *Guidance Standard on Social Responsibility*. ISO 26000 ini sifatnya hanya panduan saja dan bukan pemenuhan terhadap persyaratan (*requirements*) karena memang tidak dirancang sebagai standar sistem manajemen dan tidak digunakan sebagai standar sertifikasi (Yusuf Wibisono, 2007 : 38).

Berkembangnya *sustainability report* merupakan bagian dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*). Berdasarkan Kuhlmann (2010) pengertian pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) yang didapatkan dari *United Nations* (dalam *Agenda for Development*) yaitu pembangunan dengan wawasan multidimensional dalam mencapai kualitas hidup yang lebih tinggi. Pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) ini mencakup tiga aspek yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk mendukung adanya pembangunan berkelanjutan, *sustainability report* digunakan sebagai salah satu media informasi perusahaan kepada para *stakeholder*.

Pengungkapan pertanggungjawaban sosial suatu perusahaan menjadi keharusan bagi perusahaan-perusahaan yang telah *go-public*, sebagai bentuk akuntabilitas dan responsibilitas perusahaan kepada publik. Ikatan Akuntan Indonesia kompartemen akuntan manajemen dengan didukung Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan PT Bursa Efek Jakarta telah melakukan penilaian bagi perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan *Sustainability Reporting* dan melaporkannya sesuai dengan kualifikasi dan standar internasional tertentu yang telah ditetapkan dengan menyelenggarakan *Indonesian Sustainability Reporting Award (ISRA)*. (Yadiati, 2006).

Dalam proses pelaporannya *sustainability report*, banyak diatur dalam standar aturan-aturan internasional baku yang diadopsi oleh Indonesia salah satunya adalah *Global Reporting Initiative (GRI)* yang di dalamnya mengatur prinsip dasar yang harus terdapat pada *sustainability report* yaitu: seimbang, dapat dibandingkan, teliti, tepat waktu, jelas dan dapat dipercaya. Paradigma ini mempunyai konsep membangun bisnis tidak hanya harus menguntungkan perusahaan, tetapi juga harus menguntungkan manusia dan lingkungan sekitar. Konsep tersebut didasarkan pada konsep *sustainable development*, yaitu konsep pembangunan dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sekarang, tidak boleh mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Atas dasar pandangan ini, maka muncullah konsep *sustainability reporting (SR)*, atau *corporate social responsibility (CSR)*, atau *corporate citizenship* (Chairiri, 2009).

Ada beberapa alasan mengapa perusahaan mengimplementasikan konsep sustainable report (Darwin, 2006), diantaranya untuk menunjukkan kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan, membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan serta komunikasi dengan stakeholders, mengurangi resiko korporat dan melindungi nama baik (reputasi), analisa investasi bagi investor (*Socially Responsible Investment/SRI*), serta menghasilkan daya saing yang tinggi dalam perolehan kapital/pinjaman, SDM, dan pemasok. Alasan tersebut didasarkan pada manfaat yang diyakini akan diperoleh dari praktek tersebut.

Beberapa hasil survei menunjukkan temuan yang mendukung alasan di atas. Chariri (2009) menunjukkan survei PWC terhadap CEO global 2003 tentang *Sustainability Report* menyatakan bahwa 79% dari lebih 1000 CEO di 33 negara mengakui bahwa “sustainability is vital to the profitability of any company”. Survei lainnya yang dilakukan terhadap 350 perusahaan besar di Eropa melaporkan bahwa 78% dari eksekutif mengakui bahwa “integrating responsible business practices make a company more competitive”. Kondisi inilah yang mendorong meningkatnya praktek sustainability management.

Namun demikian, timbul masalah bagaimana mengukur keberhasilan implementasi *sustainability report*. Dalam perspektif akuntansi, cara yang dapat dilakukan untuk menunjukkan praktek sustainability management adalah dengan membuat sustainability reporting, yaitu praktek pengungkapan perusahaan tentang beberapa elemen penting yang berhubungan dengan aspek ekonomi, lingkungan, dan manusia yang digunakan untuk mengukur kinerja

dari praktek sustainability management yang dilakukan oleh perusahaan. Global Reporting Initiative (2006) telah mengeluarkan panduan yang dapat digunakan untuk mengukur praktek sustainability management dengan menunjukkan beberapa elemen penting yang berhubungan dengan aspek ekonomi, lingkungan, dan manusia.

Penelitian terdahulu oleh Sembiring (2005) mengenai *Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta*, faktor-faktor yang diindikasikan mempengaruhi pengungkapan *sustainability*, antara lain: ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri, ukuran dewan komisaris, dan leverage. Penelitian berlanjut kepada Amran dan Devi (2008) mengenai “*The Impact Of Government And Foreign Affiliate Influence On Corporate Social Reporting (The Case Of Malaysia)*”, faktor-faktor yang mempengaruhi laporan sosial perusahaan, antara lain: *factor dependence on government*, *factor dependence on foreign partner*, faktor kepemilikan saham pemerintah (*government shareholding*), faktor kepemilikan saham asing (*foreign shareholding*), tipe industri (*industry type*), ukuran perusahaan (*corporate size*) dan profitabilitas (*profitability*).

Penelitian yang dilakukan Puspitasari (2009) mengadopsi dari Amran dan Devi (2008), namun faktor kepemilikan saham pemerintah diganti dengan kepemilikan saham publik. Faktor kepemilikan saham pemerintah tidak digunakan dalam penelitian karena menimbang proporsi kepemilikan saham pemerintah pada perusahaan-perusahaan di Indonesia jumlahnya sangat

sedikit, sehingga tidak dapat dijadikan variabel penelitian. Jadi, faktor-faktor yang diadopsi oleh Puspitasari (2009) dari Amran dan Devi (2008) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR, antara lain: faktor kepemilikan saham publik (*public shareholding*), faktor kepemilikan saham asing (*foreign shareholding*), tipe industri (*industry type*), ukuran perusahaan (*corporate size*) dan profitabilitas (*profitability*).

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu diatas, yang pernah dilakukan oleh Sembiring (2005); Amran dan Devi (2008); dan Puspitasari (2009) didalam meneliti karakteristik perusahaan yang indikasikan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Diantara karakteristik perusahaan yang menjadi variabel independen dalam penelitian terdahulu adalah ukuran dewan komisaris, tipe industri, ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan saham asing dan kepemilikan saham publik.

Menurut Utomo (2000), berpendapat bahwa tipe perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sosial perusahaan. Tipe perusahaan yang lebih tinggi (*high-profile*) akan lebih banyak mengungkapkan kegiatan sosial perusahaan dibandingkan tipe perusahaan yang lebih rendah (*low-profile*). Sementara itu, sifat peraturan pemerintah yang wajib dan disertai sanksi bagi pelanggarnya, mengindikasikan bagi perusahaan *high-profile* dan *low profile* untuk wajib melaksanakan peraturan yang berlaku bagi mereka. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Sembiring (2005); Amran dan Devi (2008); dan Puspitasari (2009) menemukan bahwa tipe industri atau profil

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang berfungsi untuk mengklasifikasikan besar kecilnya entitas bisnis. Skala ukuran perusahaan dapat mempengaruhi luas pengungkapan informasi dalam laporan keuangan mereka. Perusahaan yang besar biasanya memiliki aktivitas yang lebih banyak dan kompleks, mempunyai dampak yang lebih besar terhadap masyarakat, memiliki *shareholder* yang lebih banyak, serta mendapat perhatian lebih dari kalangan publik, maka dari itu perusahaan besar mendapat tekanan yang lebih untuk mengungkapkan pertanggung jawaban sosialnya. (Cowen *et al.*, 1987) dalam (Amran dan Devi, 2008). Penelitian yang pernah dilakukan oleh Sembiring (2005); Amran dan Devi (2008); dan Puspitasari (2009) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian ini menguji pengaruh dari karakteristik perusahaan yang diproksikan pada *size of firm*, *ratio of leverage*, *ratio of profitability*, dan *type of industry* terhadap praktek pengungkapan *sustainability reporting* pada perusahaan *public* di Indonesia..

1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diidentifikasi masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah yang menyebabkan *corporate social responsibility* beralih menjadi pengungkapan *sustainability reporting*?
2. Apakah yang menyebabkan perusahaan-perusahaan yang telah *go-public* diharuskan membuat pengungkapan *sustainability reporting*?
3. Apakah yang menjadi alasan perusahaan harus menerapkan *sustainability reporting* bukan *corporate social responsibility* ?
4. Apakah ukuran perusahaan (size) mempengaruhi secara signifikan terhadap praktek pengungkapan *sustainability reporting*?
5. Apakah tingkat leverage perusahaan mempengaruhi secara signifikan terhadap praktek pengungkapan *sustainability reporting*?
6. Apakah tingkat profitabilitas mempengaruhi secara signifikan terhadap praktek pengungkapan *sustainability reporting*?
7. Apakah tipe perusahaan mempengaruhi secara signifikan terhadap pengungkapan *sustainability reporting*?

1.2 Pembatasan Masalah

Agar tidak menyimpang dari permasalahan yang dibahas dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka penulis membatasi permasalahan pada fokus Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Praktek Pengungkapan *Sustainability Reporting* dalam Laporan Tahunan Perusahaan *Public* di Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini dituangkan dalam bentuk pertanyaan, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah size perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability reporting*?
2. Apakah tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability reporting*?
3. Apakah tingkat *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability reporting*?
4. Apakah tipe perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability reporting*?

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh tingkat size perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability reporting*.
2. Menganalisis pengaruh tingkat profitabilitas perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability reporting*.
3. Menganalisis pengaruh tingkat leverage terhadap pengungkapan *sustainability reporting*.

4. Menganalisis pengaruh tipe perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability reporting*.

1.5.2 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan bagi manajemen perusahaan untuk meningkatkan kualitas laba perusahaan di dalam maupun di luar pasar modal.

- b. Bagi Universitas

Disamping dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori akuntansi internasional dan seminar akuntansi keuangan juga diharapkan dapat menambah pengetahuan serta sebagai acuan referensi dan dokumentasi untuk penelitian selanjutnya.

- c. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan penulis dalam memahami masalah-masalah yang terjadi dalam dunia kerja nyata, terutama permasalahan yang berkaitan dengan masalah : respon pasar atau investor terhadap penerapan standar akuntansi internasional di Indonesia.